

Analisis Dampak Kerja Sama Tiongkok – Indonesia melalui Aktivitas Utang Luar Negeri Periode 2015 – 2019 (Studi Kasus: CHINA DEVELOPMENT BANK (CDB))

Vilenta Ramadana Ovilia¹

Puti Parameswari²

Ramdhan Muhaimin³

Abstract

The aim of this research is to explain the analysis of cooperation carried out by China Development Bank (CDB) with Indonesia through its foreign debt activities in the 2015-2019 period. This research is based on the background of the existence of international cooperation that has been carried out by Indonesia from the time of independence to the present, including bilateral activities with a variety of activities, one of which is seeking additional funds by taking economic policies by making loans to the state which can be called foreign loans / debts. In order to reach the objective of this research, secondary data are qualitatively analysed using the conceptualization of impacts of international cooperation in the forms of external debt including the results to dependency. The results of this research are that there are various opportunities or positive things that can be taken in analyzing the existence of foreign debt between China and Indonesia from both sides, especially on the side of the relationship between the two countries that creates progress between the two countries and win-win solutions in various countries.

Keywords: *external debt, China Development Bank, Indonesia, impact*

Pendahuluan

Implementasi kerja sama internasional yang digiatkan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini dengan pendekatan bilateral diharapkan dapat membantu Indonesia dalam rangka mewujudkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kerja sama bilateral yang dilakukan dilakukan melalui transaksi jual beli internasional, ekspor impor barang, perjanjian mengenai investasi asing, juga tidak terlepas dari usaha mencari dana tambahan

¹ Vilenta Ramadana Ovilia, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur. Alamat Email: vilentaovilia@gmail.com.

² Puti Parameswari, S.Hum., M.Si, Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur.

³ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Al-Azhar Indonesia.

dengan melakukan aktivitas peminjaman kepada aktor sebuah negara ataupun kepada lembaga keuangan yang disebut dengan utang luar negeri (Majid, 2013).

Dalam melakukan aktivitas utang luar negeri, Indonesia lebih banyak melakukan pinjaman kepada negara memiliki kemudahan prosedur dalam pengajuan utang serta tidak menerapkan syarat peminjaman ke Negara lain yang begitu menyulitkan, salah satunya ialah Negara tirai bambu, Tiongkok. Dalam menjalin hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, salah satunya ialah pada aspek ekonomi yaitu aktivitas pinjaman luar negeri, bahwa Indonesia sejak dahulu masih menyandang identitas sebagai penerima pinjaman dan Tiongkok sebagai pemberi pinjaman. Hal tersebut diwajarkan terjadi karena kekuatan dan kekayaan Tiongkok yang sudah tidak lagi diragukan sehingga dimanfaatkan Indonesia untuk meminta bantuan melalui pinjaman luar negeri tersebut. Walaupun banyak para ahli ekonomi maupun beberapa individu penggerak pemerintah memiliki sentimen negatif terhadap adanya kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam sektor pinjaman luar negeri ini namun pada nyatanya kerja sama yang terjalin harmonis, dengan bukti banyak proyek ekonomi yang selalu berjalan hingga saat ini.

Salah satu contoh *platform* terbesar bagi Tiongkok untuk hadir dalam aktivitas pemberian pinjaman luar negerinya di Indonesia terletak pada pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCBJ) di tahun 2015 sebesar Rp 13 Triliun dari keseluruhan struktur pembiayaan ini, 63% pinjaman dalam dollar AS bersumber dari China Development Bank (CDB), bank milik Tiongkok. CDB memberikan jangka waktu pengembalian utang itu hingga 40 tahun dengan tenor pelunasan 10 tahun. Sedangkan 25% pinjamannya bersumber dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) (Kompas, 2019). Sebagai informasi, Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) merupakan proyek transportasi masa kini yang akan memangkas waktu perjalanan penumpangnya hingga 40 menit lintasan sepanjang 142,3 km, jauh lebih cepat dibandingkan dengan waktu tempuh kereta api reguler yang saat ini yakni 3 jam lebih. Standar kecepatan kereta cepat ini akan mencapai 350 km/jam. Proyek ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2021 mendatang.

Selain itu, contoh lain dalam pemberian pinjaman Tiongkok kepada Indonesia melalui China Development Bank (CDB) yaitu pada pemberian pinjaman senilai Rp 43,28 triliun kepada pemerintah nasional menjaminkan pinjaman tersebut kepada tiga bank BUMN, yang di antaranya terdapat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri Tbk dengan kesepakatan skema utang (tenor) selama 10 tahun dengan bunga 4,3%. Ketiga bank tersebut masing-masing memegang USD 1 miliar (CNN Indonesia, 2015). Pembiayaan ini bertujuan untuk penyediaan anggaran pembangunan infrastruktur. Rinciannya, 62% untuk pembangkit listrik, 25% untuk jalan tol, dan 13% untuk sektor agribisnis.

Melihat total utang luar negeri Indonesia yang digelontarkan Tiongkok dengan sukarela kepada Indonesia serta keharmonisan yang jarang terjadi antara kedua negara dengan level berbeda ini sekiranya membutuhkan perhatian, pengkajian, serta analisis mendalam mengenai apakah hubungan Indonesia dan Tiongkok khususnya pada China Development Bank (CDB) melalui utang luar negeri ini juga akan selalu menghasilkan manfaat di antara keduanya. Jika melihat dari sisi lainnya pengaruh apa yang ditimbulkan dari hasil kerja sama melalui pinjaman luar negeri ini. Di sisi lain, melihat dari contoh yang dibawa mengenai kuantitas utang luar negeri pada berbagai pembiayaan di Indonesia (Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung) serta terdapat kasus penyalahgunaan fungsional pinjaman pada 2015 akan sangat menarik jika ditelusuri lebih dalam mengenai potensi ancaman politik, ekonomi, dan kedaulatan bangsa di masa depan nanti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rentang waktu 2015 hingga 2019. Alasan penggunaan periode ini dikarenakan adanya intensitas peningkatan serta gejala utang luar negeri Indonesia kepada Tiongkok dari tahun 2015 hingga 2019. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana analisis dampak kerja sama Tiongkok – Indonesia melalui aktivitas utang luar negeri melalui China Development Bank pada periode 2015 – 2019.

Pembahasan

Negara pemberi pinjaman maupun Negara yang penerima pinjaman pada hakikatnya akan selalu menerima manfaat dari adanya aktivitas pinjaman luar negeri. Dari pandangan pemberi pinjaman, konsep ini diciptakan dari asumsi mengenai besarnya timbal balik yang diterima, baik yang dinilai secara langsung maupun sebaliknya, tergantung kepada kuantitas atau motivasi nilai pinjaman yang mengalir kepada Negara penerima. Masyarakat Negara pemberi pinjaman dapat menerima *quantitative benefit* dari pinjaman berupa hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, melalui berbagai dampak penggunaan positif dari pinjaman itu (Siregar, 2016: 53). Dengan salah satu kasus yang diangkat dan juga berbagai kerja sama lainnya yang masih banyak lagi terutama pada periode 2015 – 2019, menarik apabila dampak atau pengaruhnya mampu ditelaah dan dianalisis secara mendalam menggunakan 2 (dua) pendekatan teori yaitu pertama melalui pendekatan kerja sama internasional dan kedua menggunakan pendekatan dependensi (ketergantungan).

Dampak adalah (Waralah, Cristo, 2008) sebuah rasa ingin, dalam hal meyakinkan, memengaruhi, membuat sesuatu objek/hal/orang mengikuti arahan dan mendukung tujuan yang telah disampaikannya. Dampak terbagi menjadi 2 (dua) jenis di antaranya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah sebuah hasil dari mendatangkan pengaruh, kegiatan yang diikuti dan didukung dalam lingkup hal-hal yang baik dan positif. Sebaliknya pada dampak negatif dapat diartikan dengan pengaruh yang mendatangkan akibat, reaksi, atau perilaku buruk atau negatif dapat diartikan juga sebagai pengaruh buruk lebih besar dari pengaruh baiknya.

Analisis Dampak Kerja Sama Tiongkok (China Development Bank) - Indonesia melalui Aktivitas Utang Luar Negeri Periode 2015 – 2019 Dilihat dari Perspektif Kerja Sama Internasional

Asumsi Pertama Kerja Sama Internasional

Asumsi pertama dari teori kerja sama Internasional yaitu sebuah teori yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar negara atau kelompok – negara atau kelas lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Jelas di sini bahwa Indonesia dan Tiongkok saling memberikan sinergitasnya dan yang dimilikinya untuk dapat berkontribusi berbagi dan saling memenuhi kebutuhan negara penerima kerja samanya. Kedua negara ini memahami bahwa dunia bukan lagi yang dikatakan pada perspektif Realisme (Jackson & Sorensen, 1999) bahwa "Hubungan antarnegara soal hubungan yang konfliktual dan saling menjatuhkan satu sama lainnya". Hal ini pun sejalan dengan perspektif yang berlainan dari Realisme yaitu Liberalisme, bahwa perspektif ini berpandangan bahwa hubungan antarnegara merupakan hubungan yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan, dan Liberalisme pun mengakui adanya teori kerja sama Internasional yang berjalan selaras. Dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok melalui hubungan ekonominya terlihat bahwa tingkatan kolaborasi yang paling sesuai dalam menggambarkan hubungan keduanya. Kolaborasi diartikan sebagai tingkatan dalam kerja sama internasional/antar hubungan bernegara yang lebih tinggi dari konsensus untuk

mencapai sebuah visi dan misi, tujuan, serta arah strategi yang lebih erat dan aktif disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing.

Asumsi Kedua Kerja Sama Internasional

Asumsi kedua yang menjelaskan kerja sama Internasional sebagai sebuah proses hubungan antarnegara menggiatkan aktivitas penemuan solusi permasalahan melalui pendekatan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan aktivitas yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok. Dari sisi Tiongkok dan China Development Bank (CDB), dilihat dari kontribusinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik kekurangan biaya pembangunan infrastruktur, kelengkapan sarana dan fasilitas, kebutuhan transfer teknologi, dan membantu menciptakan citra dan legitimasi baik Indonesia di mata dunia, telah diberikan berbagai solusi terbaiknya untuk Indonesia, mulai dari pengiriman bantuan dana pinjaman, investasi, terbukanya jalur akses perdagangan melalui berbagai perjanjian, transfer teknologi melalui pengiriman tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia, serta bantuan lainnya yang pada akhirnya mampu membuat Indonesia satu persatu bangkit dari setiap permasalahannya, serta percaya diri dalam melanjutkan pembangunan bangsa ke arah yang lebih maju.

Di sisi lain, kontribusi Indonesia ke Tiongkok banyak berupa dukungan, keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan perjanjian serta kesepakatan dalam berbagai program lintas batas negara yang dibuat oleh Tiongkok, serta ketersediaan Indonesia menjadi mitra strategis Tiongkok dirasa sudah sangat cukup menggambarkan keseimbangan timbal balik bantuan yang diberikan Indonesia kepada Tiongkok. Beberapa contoh nyata bantuan serta kontribusi Indonesia untuk Tiongkok berupa penandatanganan beberapa dokumen dan juga menyepakati rencana tindakan dalam rangka perwujudan kemitraan komprehensif Indonesia – Tiongkok pada 2017 – 2022, penandatanganan kerja sama bilateral dalam rangka sinergitas gagasan Poros Maritim Dunia, serta inisiatif Jalan Sutra Maritim Abad ke-21, dan kesepakatan menyetujui kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang merupakan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam rangka terciptanya sebuah koridor ekonomi untuk menyelaraskan *geopolitic strength dan geopolitic economy* pada Kawasan Asia, Eropa dan Afrika dari beberapa negara yang memiliki status *middle power*.

Asumsi Ketiga Kerja Sama Internasional

Asumsi ketiga mengenai kerja sama Internasional sesuai dengan yang dikatakan oleh Dougherty dan Pfaltzgraff yang menyatakan bahwa serangkaian hubungan yang terjalin antarnegara tanpa paksaan ataupun kekerasan dan dijamin oleh hukum (Kompas, 2019). Menurutinya pula, kerja sama Internasional ini perlu fokus pada adanya rezim internasional sebagai bentuk aturan, norma, syarat dan aturan yang disetujui satu sama lainnya.

Menurut SS Lotus C., *Military and Paramilitary Activities and Against Nicaragua* (Merits) (Nicaragua/United States) tercatat bahwa Hukum kebiasaan internasional menerapkan prinsip bahwa negara dilarang untuk melakukan secara paksa bekerja sama dengan cara mengintervensi sampai pada tahap menggoyahkan kedaulatan negara lain tanpa persetujuan dari negara lain tersebut (Planck, 2000). Hal ini yang memastikan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang ekonomi ini tidak dapat bersifat memaksa baik dari Tiongkok ataupun dari Indonesia sendiri. Dalam hal ini, dengan adanya teori yang dikemukakan dua tokoh besar tersebut maka Indonesia ke Tiongkok maupun Tiongkok ke Indonesia tidak ada satupun paksaan keduanya harus untuk melakukan kerja sama di bidang ekonomi dan pembangunan ini. Jika memang sudah ada paksaan serta kekerasan di dalamnya, tidak mungkin hubungan antarnegara terjalin hingga 60 tahun secara harmonis walaupun penuh dengan gejolak dan dinamikanya. Jika dilihat pada

sejarah era kepresidenan Soekarno dan Soeharto, Indonesia memutuskan kembali untuk melakukan kerja sama dengan Tiongkok atas dasar saling membutuhkan dan percaya.

Asumsi Keempat kerja sama Internasional

Pada asumsi keempat teori kerja sama Internasional terdapat tujuan dari kerja sama internasional itu sendiri. Pertama, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara melakukan pengurangan biaya yang ditanggung pada negara tersebut dan dialihkan dengan pembuatan produk bagi kebutuhan rakyatnya, yang kedua dalam rangka efisiensi terkait adanya biaya yang kurang dalam sebuah proyek nasional di sebuah negara, dan yang terakhir dalam rangka pengurangan dampak kerugian negatif dari adanya sikap negara lain (Holsti, 1992). Dalam rangka terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia dengan berbagai pembangunan yang dirancang. Salah satunya Tiongkok membantu kekurangan pembiayaan nasional melalui pinjaman luar negeri. Dengan adanya keterbukaan hubungan Indonesia Tiongkok dalam urusan pinjaman luar negeri ini, hubungan ekonomi keduanya semakin erat dengan berbagai aktivitas kerja sama lainnya, seperti adanya peningkatan kerja sama Iptek dan Inovasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas) serta Kementerian Iptek Tiongkok berhasil membuat *Joint Committee Meeting* (JCM) yang dilaksanakan pada Agustus 2017 (Technology Indonesia, 2017). Forum kerja sama bilateral ini dibentuk dalam rangka memperkuat penguasaan mengenai teknologi bagi sumber daya manusia terutama bagi program Pendidikan generasi muda di dunia yang strategis dan berfikir maju, serta mampu bersinergi berkontribusi bagi peningkatan perekonomian di negara masing-masing.

Analisis Dampak Lainnya

Dampak kerja sama internasional yang terjalin antara Indonesia dan *China Development Bank* ini secara umum, mampu membangkitkan berbagai kerja sama lainnya oleh Tiongkok kepada Indonesia dibidang ekonomi seperti dapat terlihat dari membangun bersama proyek produksi nikel dan baja yang bernamakan proyek Morowali di Sulawesi Tengah (Finance Detik, 2018). Investasi dan pinjaman dana dari negara Tiongkok dengan nilai yang cukup besar berperan penting dalam pengelolaan perusahaan ini. Proyek Morowali merupakan perusahaan hasil pengolahan nikel dan baja yang modalnya bersumber dari Shanghai Investment Group dan juga Perusahaan Bintang Delapan Mineral dari Indonesia. Selain itu, pada pengimplementasian *China's Peaceful Development* melalui *the 11th Five Year Plan* (China Embassy, 2011) yang bentuk implementasinya ialah pengaplikasian perjanjian kerja sama *joint strategic partnership* dengan Indonesia. Dengan menggunakan prinsip *open door policy*, Tiongkok menggiatkannya dengan cara pemberian kontribusi *win win solution* melalui kegiatan investasi asing yang difokuskan pada sektor industri, tambang dan infrastruktur. Melalui *China Development Bank* (CDB) pihak dari Tiongkok lainnya mampu berperan penting dalam memberikan harapan baru bagi pembangunan Indonesia melalui kontribusinya pada berbagai pembiayaan hingga pada akhirnya, Indonesia mampu melancarkan berbagai pembangunan seperti kereta cepat Jakarta – Bandung, proyek *re-planting* kelapa sawit, dan proyek infrastruktur lainnya.

Dampak lain yang dapat dirasakan adalah adanya inflasi kedatangan tenaga kerja asing (TKA) yang banyak didominasi oleh Tiongkok di Indonesia. Pada data awal bulan Mei 2021, jumlah TKA Tiongkok yang terus bertambah hingga mencapai 8.700 orang. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah hal ini disebabkan akibat kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok baik dalam bidang investasi maupun pinjaman luar negeri berbanding lurus dengan adanya pertukaran informasi, budaya, hingga kependudukan setiap warga negaranya. Baik Investasi terutama, yang secara otomatis akan menyebabkan banyak TKA Tiongkok masuk ke Indonesia dan ditempatkan

ke berbagai wilayah di Indonesia (CNBC Indonesia, 2021). Hal ini dapat dianalisis dengan sudut pandang dampak secara positif adalah transfer ilmu dan teknologi yang akan dirasakan antartanaga kerja dalam ruang lingkup yang menghasilkan kesetaraan dalam kemampuan dan potensi sesama tenaga kerja dari 2 (dua) negara ini akan selaras. Sebaliknya, pada sudut pandang negatif adalah ketidakmampuan tenaga kerja Indonesia dalam menyelaraskan potensi dan kemampuan diri untuk dapat selaras dengan ilmu, teknologi dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja asing. Hal ini dapat mengakibatkan sebuah keterlambatan yang nyata apabila tenaga kerja Indonesia tidak mampu menyusul ketertinggalan dan keengganan untuk memanfaatkan serapan apapun peluangnya.

Analisis Dampak Kerja Sama Tiongkok (China Development Bank) Indonesia melalui Aktivitas Utang Luar Negeri Periode 2015 - 2019 Dilihat dari Perspektif Dependensi (Ketergantungan)

Dilihat dari Keterkaitannya dengan Dependensi Finansial

Asumsi pertama dilihat dari adanya pengertian dependensi finansial yang dimaksudkan, negara pinggiran merasa dirinya politis sudah menduduki posisi sejahtera tanpa terjajah. Akan tetapi Negara pinggiran masih menghadapi dominasi kekuatan finansial dari Negara pusat. Pada pengaplikasiannya, melihat struktur pada negara Indonesia dan Tiongkok sesuai dengan teori sistem dunia, bahwa Tiongkok sebagai status negara *core*/negara pusat, sedangkan Indonesia berada pada status negara *periphery*/negara semi pinggiran. Hal ini dimanfaatkan Tiongkok sebagai negara adidaya ke-2 melancarkan aksi ekspansi pengaruh pergerakan ekonomi dunia melalui bahasa diplomasi dalam sistem ekonominya yaitu "Business to Business" melalui *China Development Bank* (CDB) ke berbagai perusahaan atau pihak non-pemerintah di berbagai negara, terutama pada Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) melalui Belt and Road Initiative (BRI) atau lebih spesifik dengan menanamkan pinjaman luar negeri.

Relevansi utang luar negeri Indonesia – Tiongkok (*China Development Bank*) dengan teori dependensi finansial adalah Indonesia masih belum mempertimbangkan secara matang dan jangka panjang dampak dan risiko yang akan diterima Indonesia apabila terus menerus menambah utang lebih dari total pada tahun 2019 sebesar USD 15,491 miliar atau sekitar Rp 206 triliun. Faktanya dianggap pemerintah maupun non-pemerintah Indonesia merupakan sebuah nominal pinjaman yang sedikit dan masih dapat diatasi. Namun jika melihat pada analisis Tiongkok dengan berbagai strategi jituanya meraup semua hal dan kekuasaan bagi kemajuan ekonominya sendiri, analisis menyatakan bahwa Tiongkok melalui *China Development Bank* (CDB) mampu untuk mengikis satu per satu fokus Indonesia dalam kekayaan pembangunan milik pribadi, salah satunya adalah cadangan devisa. Hubungannya hal ini adalah sumber pendanaan untuk proses pelunasan utang luar negeri Indonesia adalah telah disepakati berasal dari cadangan devisa negara. Setiap pembayaran utang luar negeri selalu mengandalkan sumber cadangan devisa, dan periode 2015 – 2019, perkembangan devisa Indonesia terlihat pada grafik dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Cadangan Devisa Indonesia 2015 – 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Berdasarkan data dapat dilihat cadangan devisa Indonesia periode 2015 – 2019 mengalami dinamika peningkatan dan penurunan. Dari 2015 menempati nilai sebesar USD 105,931 hingga pada tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan dari USD 130,196 ke angka USD 120,654. Pada 2019, cadangan devisa Indonesia menempati angka senilai USD 123,800. Untuk membahas lebih detail mengenai data cadangan devisa Indonesia selanjutnya dilihat posisinya pada keadaan utang luar negeri Indonesia pada periode yang sama. Adanya beberapa utang Indonesia baik di dalam urusannya dengan Tiongkok (*China Development Bank* (CDB)) maupun kepada negara lain yang memiliki jatuh tempo pembayaran utang pada antara tahun misalnya, pada tahun 2018. Jika cadangan devisa pada awalnya untuk membayar utang luar negeri sedikit demi sedikit, justru menjadi terus menerus dengan total bunga yang terus berlipat, hal ini dikhawatirkan akan menggerus cadangan devisa Indonesia itu sendiri dan akan berdampak pada sumber pendanaan bagi segala hal terkait proses kemajuan dan pembangunan di Indonesia.

Dilihat dari Keterkaitannya dengan Debt Trap Strategy

Debt trap strategy adalah keadaan bahwa debitur tidak mampu untuk melunasi hutang yang telah diterimanya. Situasi jebakan utang dapat timbul karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi atau perubahan syarat dan kondisi utang yang timbul. Pada intinya, biasanya, jebakan utang akan mengakibatkan gagal bayar atau kebangkrutan (ABC Action News, 2019). Tidak ada contoh lain yang dapat menggambarkan proses pengimplementasian strategi ini selain kebijakan Tiongkok dalam memberikan berbagai pinjamannya ke negara berkembang yang sedang berambisi pada pembangunan proyek infrastruktur, salah satunya Indonesia. Maka dari itu, melalui BRI yang sudah dijelaskan sebelumnya, di bawah bendera perdagangan, keterbukaan dan kemakmuran masa depan Tiongkok. Hal ini menjadi peluang besar bagi dirinya karena mampu untuk memperluas jaringan, jangkauan, mengeksport barang dan tenaga kerja ke Indonesia dengan transfer teknologinya. Selain itu juga memiliki tujuan kuat terhadap adanya penghubungan secara geopolitik di antara negara-negara yang dekat dalam bidang ekonomi. Dari adanya pertimbangan ini, analisis yang dapat diberikan adalah apabila terjadinya *debt trap*, jika nanti negara-negara yang tidak dapat melunasi utangnya maka Tiongkok dapat dengan lantang membuat ketentuan dan kebijakan besar yang menjadi boomerang menggoyangkan kedaulatan bagi negara.

Pada umumnya, setiap hal mampu mempertimbangkan bahwa faktor mengapa ketergantungan atau dependensi seperti ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Tak lain seperti permisalan yang diberikan Brown K, "Ia (Tiongkok) tidak dapat lagi berpura-pura menjadi tikus ketika semua orang tahu bahwa ia adalah gajah besar." (Kerry, 2018). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mewaspadaai kemungkinan *debt trap* yang terjadi pada negara lain menimpa negeri sendiri. Kewaspadaan tersebut dilakukan dari dua sisi, internal dan eksternal. Pada sisi internal, kewaspadaan antisipatif dapat dilakukan dengan penguatan kemandirian ekonomi seperti melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi mikro dan menengah dalam negeri, pembatasan ekspor pada bahan-bahan dasar strategi untuk kepentingan nasional, peningkatan devisa melalui penegakan hukum kasus-kasus besar korupsi, hingga optimalisasi bonus demografi dan diaspora Indonesia. Pada sisi eksternal, menguatkan diplomasi Indonesia di level regional dan internasional dengan berbagai kekuatan, tidak saja terhadap Tiongkok.

Dilihat dari Aspek Kedaulatan Bangsa Indonesia

Jika sebuah negara melibatkan diri pada aktivitas utang luar negeri, maka dapat berkorelasi pada segala kebijakan politik dan ekonomi negara ke depannya. Dengan utang luar negeri yang terus bertambah, negara-negara pemberi pinjaman menetapkan regulasi baru terkait jaminan dan kuantitas persen bunga yang harus ditanggung tiap-tiap Negara penerima pinjaman. Hal itu jelas hanya membuat kedaulatan bangsa Indonesia, dan kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia semakin terjepit. Utang luar negeri Indonesia oleh Tiongkok dapat menggoyahkan dan mengancam kedaulatan Indonesia. Dapat dianalisis dengan melihat kerelaan pemerintah demi mendapatkan dana baru melalui utang luar negeri, lalu rela memberikan ganti apa saja atas utang yang akan diperolehnya, seperti kebijakan pemerintah dalam pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak didukung atau bahkan dilarang memiliki mobil nasional, penjualan aset Indosat milik Indonesia tahun 2014, dan pada akhirnya Tiongkok dapat bebas mengintervensi kearifan lainnya terutama dalam bidang-bidang strategis. Produk Tiongkok dapat diterima dengan mudah dan leluasa. Tanpa disadari dikhawatirkan nantinya Indonesia tidak lagi berdaya ketika sudah kehilangan harapan seperti demikian. Masa depan bangsa akan sedikit demi sedikit hilang dalam jebakan utang serta kehilangan jati diri dan kedaulatan bangsa.

Pengalaman Dependensi Negara Lain kepada Tiongkok dalam Aktivitas Utang Luar Negeri

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus Negara lain terhadap pencabutan hak milik Negara ke Negara lain diakibatkan tidak dapat melunasi utang yang begitu besar seperti Sri Lanka. Bantuan berupa utang luar negeri yang diberikan berujung kerugian besar Sri Lanka yang mewajibkannya agar merelakan pelabuhan dan bandara miliknya untuk dikoordinir oleh Tiongkok. Proyek Pelabuhan Hambantota ini terletak di pantai Selatan Sri Lanka melalui pemberian utang sebesar USD 1,5 miliar. Bantuan tersebut diberikan pada tahun 2010. Namun, pada 2017 Sri Lanka harus merelakan pelabuhan tersebut kepada Tiongkok karena tidak mampu membayar utangnya (Kompas, 2018). Pada saat itu, Sri Lanka tercatat memiliki utang kepa Tiongkok sebesar USD 8 miliar. Bila difikirkan kembali, jika harus membayar utang tersebut Sri Lanka harus menghabiskan biaya sebesar 94% dari produk domestik bruto (PDB) (Finance Detik, 2018). Akibat lainnya setelah pengambilan pelabuhan tersebut, Sri Lanka sampai saat ini masih dalam kondisi kegaduhan di dalam politiknya. Terdapat 3 (tiga) negara yang gagal membayar utang lainnya adalah Zimbabwe, Nigeria, dan Pakistan (Tempo, 2018). Konsekuensinya lainnya beragam mulai dari mengganti mata uang menjadi Yuan, dan lain-lain.

Kesimpulan

Contoh kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini dengan pendekatan bilateral adalah aktivitas utang luar negeri. Indonesia lebih banyak melakukan pinjaman kepada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan yang lainnya. Pada negara-negara tersebut pengajuan pinjaman memiliki kemudahan dalam prosedur pengajuan utang serta tidak menerapkan syarat peminjaman ke Negara lain yang begitu menyulitkan, salah satunya ialah Negara tirai bambu, Tiongkok. Indonesia bekerja sama salah satunya dengan China Development Bank (CDB). CDB merupakan bank dengan membuka layanan perbankan di seluruh dunia teraktif yang dimiliki Tiongkok. CDB sudah menggelontorkan dana utang ke Indonesia sebesar USD 11,4 juta atau sekitar Rp 152,760 miliar.

Kerja sama Indonesia dan Tiongkok khususnya pada pihak China Development Bank (CDB) periode 2015 – 2019 dapat dianalisis melalui pandangan positif dan negatif. Dalam pandangan positif, penulis mengambil sudut perspektif menggunakan kerja sama Internasional bahwa Tiongkok membantu kekurangan pembiayaan nasional melalui pinjaman luar negeri. Dampaknya terasa pada hubungan ekonomi keduanya semakin erat dengan berbagai aktivitas kerja sama lainnya, seperti adanya peningkatan kerja sama Iptek dan Inovasi. Selain pada dampak dari peningkatan ketertarikan Indonesia pada aspek teknologi, dampak Indonesia dan Tiongkok dalam hubungan baik kerja sama ekonomi melalui aktivitas utang luar negerinya bukan hanya dirasakan oleh pada level negara/pemerintahan melainkan juga pada keterbukaan kerja sama kedua perusahaan dari setiap negara adalah terlihat pada upaya keduanya membangun bersama proyek produksi nikel dan baja di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pada sudut pandang lainnya yaitu sudut pandang analisis dampak negatif dapat dilihat sebagai aspek ancaman, kekhawatiran yang nantinya mampu menjadi pelajaran dan motivasi Indonesia untuk merancang posisi dan strategis Indonesia. Berdasarkan perspektif dependensi (ketergantungan) bahwa dampaknya mengacu pada dependensi *finansial*. Negara pinggiran secara politis sudah menduduki posisi sejahtera tanpa terjajah. Akan tetapi kenyataannya Negara pinggiran masih dikuasai oleh kekuatan finansial dari Negara utama/pusat. Selain itu, Dalam melihat dampak lainnya dari dependensi Indonesia terhadap utang luar negerinya di Tiongkok, adalah mengenai aspek ketahanan kedaulatan bangsa Indonesia yang terganggu akibat adanya campur tangan asing. Hal ini yang sangat di khawatirkan menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Dengan utang luar negeri yang terus bertambah, negara-negara pemberi pinjaman menetapkan regulasi baru terkait jaminan dan kuantitas persen bunga yang harus ditanggung tiap-tiap Negara penerima pinjaman dan hal ini yang hanya membuat kedaulatan bangsa Indonesia semakin terjepit.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus Negara lain terhadap pencabutan hak milik Negara ke Negara lain diakibatkan tidak dapat melunasi utang yang begitu besar seperti Sri Lanka. Bantuan berupa utang luar negeri yang diberikan berujung kerugian besar Sri Lanka yang mewajibkannya agar merelakan pelabuhan dan bandara miliknya untuk dikelola Tiongkok. Hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk tetap melanjutkan hubungan baiknya dengan Tiongkok adalah dengan terus menanamkan pola pikir utama bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan SDA dan SDM nya yang nantinya secara positif dapat untuk dikelola dengan maksimal tanpa adanya ketergantungan.

Referensi

- Cristo, Waralah Rd. (2008). *Definisi Dampak Positif dan Negatif*. Amerika Serikat: Harvard University Press Inc.
- Holsti, KJ. (1992). *International Politics, A Framework for Analysis*. Amerika Serikat: New Jersey.
- Jackson, Robert & Sorensen. (1999). *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press Inc.
- Kerry, Brown. (2018). *The World According to Xi*. London: I.B. Taurus & Co.
- Majid, M. Khairin. (2013). *Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1986-2011*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Siregar, Reva Rinanda. (2016). "Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina)". *Jurnal Hubungan Internasional* 5 (1):53.
- ABC Action News. (2019). *What Is A Debt Trap*. Video. United States of America. <https://youtu.be/dLtgRM-gfIM> diunduh 25 Juni 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Posisi Cadangan Devisa (Juta USD) 2018-2020*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1091/1/posisi-cadangan-devisa.html> diakses 21 Juni 2021.
- China Embassy. 2011. *Full Text: China's Peaceful Development*. <http://mm.china-embassy.org/eng/zggk/wjjs/t856003.htm> diakses 16 Juni 2021.
- CNN Indonesia. (2015, 17 September). "Tiga Bank BUMN Berutang Rp 43.28 Triliun dari Bank China." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150917064505-78-79263/tiga-bank-bumn-berutang-rp-4328-triliun-dari-bank-china?> diakses 2 November 2019.
- CNBC Indonesia. (2021, 25 Mei). "Catat.. Ini Jawaban Menaker Kenapa RI Dibanjiri TKA China" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525102014-4-248137/catat-ini-jawaban-menaker-kenapa-ri-dibanjiri-tka-china> diakses 21 Agustus 2022.
- Finance Detik. (2018, 07 Agustus). "Asal Muasal Banyaknya Tenaga Kerja China di Morowali." <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4153343/asal-muasal-banyaknya-tenaga-kerja-china-di-morowali> diakses 16 Juni 2021.
- Finance Detik. (2018, 21 Agustus). "Mahathir: Saya Yakin China Tak Ingin Malaysia Bangkrut". <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4176197/mahathir-saya-yakin-china-tak-ingin-malaysia-bangkrut> diakses 4 Desember 2019.
- Kompas. (2018, 21 Maret). "Bangun Infrastruktur Pakai Utang dari China. Negara-Negara Ini Malah Bangkrut." <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/21/161116226/bangun-infrastuktur-pakai-utang-dari-china-negara-negara-ini-malah-bangkrut?page=all> diakses 4 Desember 2019.
- Kompas. (2019, 07 Agustus). "Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Telan Rp 40 Triliun hingga Akhir 2019" <https://money.kompas.com/read/2019/08/07/135252526/proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-telan-rp-40-triliun-hingga-akhir-2019> diakses 26 Juli 2021.
- Kompas. (2019, 18 Desember). "kerja sama Internasional: Pengertian, Alasan dan Tujuannya" <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all> diakses 11 April 2021.
- Max-Planck-Institut. 2000. *World Court Digest*. https://www.mpil.de/de/pub/publikationen/archiv/world-court-digest.cfm?fuseaction_wcd=aktdat&aktdat=102020100100.cfm diakses 13 Juni 2021.

- Technology Indonesia. (2017. 27 November). "Indonesia – Tiongkok Tingkatkan kerja sama Iptek dan Inovasi." <http://technology-indonesia.com/lain-lain/umum-lain-lain/indonesia-tiongkok-tingkatkan-kerja-sama-ipitek-dan-inovasi/> diakses Juni 2021.
- Tempo. (2018, 22 Maret). "4 Negara Gagal Bayar Utang ke China. Indef Ingatkan Akibatnya". <https://bisnis.tempo.co/read/1071926/4-negara-gagal-bayar-utang-ke-china-indef-ingatkan-akibatnya> diakses 5 Desember 2018.